

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Bencana gempa bumi yang melanda Lombok pada tahun 2018 merupakan salah satu bencana besar yang berdampak signifikan terhadap infrastruktur, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur. Meskipun tidak secara formal ditetapkan sebagai bencana nasional, skala kerusakan, jumlah korban, dan kompleksitas pemulihannya menunjukkan bahwa bencana ini memiliki implikasi yang setara dengan bencana nasional. Situasi ini menuntut keterlibatan dan koordinasi lintas aktor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga internasional untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Namun demikian, peran pemerintah daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi belum sepenuhnya optimal. Adanya kesenjangan atau tantangan dalam pemulihan pascagempa, yaitu keterbatasan anggaran, membuat pemerintah maupun pemda baru melaksanakan pemulihan di sektor pemukiman, sementara ruang lingkup terdampak berdasarkan dokumen R3P tidak hanya pemukiman, melainkan sektor infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Oleh karena itu, intervensi dan bantuan organisasi internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP) menjadi penting untuk mengisi kesenjangan dalam pemulihan dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Hal ini melihat bagaimana bantuan yang diberikan UNDP ditujukan pada sektor lainnya khususnya untuk mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat.

Melalui proyek PETRA, UNDP hadir tidak sekadar menjadi penyalur bantuan, tetapi juga mereka merancang dan melaksanakan pendekatan pemulihan yang berbasis komunitas dan berkelanjutan, yang berdampak pada

pemulihan penghidupan (*livelihood recovery*) masyarakat terdampak. Dalam kerangka teoretis Kelly-Kate Pease (2019), penelitian ini menemukan bahwa UNDP secara konsisten menjalankan empat dari lima peran utama organisasi internasional, yakni sebagai *problem solving*, *collective act mechanism*, *aid provider*, dan *capacity builder*. Peran-peran ini saling berkelindan, menunjukkan sinergi yang mendorong pemulihan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap kerusakan, tetapi juga transformatif dan partisipatif.

Sebagai *problem solving*, UNDP tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga menjawab persoalan stagnasi ekonomi masyarakat melalui intervensi pembangunan saluran irigasi, embung, dan instalasi air bersih. Infrastruktur ini secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian dan ekonomi komunitas. Sebagai *collective act mechanism*, UNDP berhasil memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah pusat (BNPB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan), pemerintah daerah, lembaga donor internasional seperti KfW Jerman, dan organisasi masyarakat sipil seperti Paluma Nusantara dan Wahana Visi Indonesia. Mekanisme kerja sama ini memungkinkan pelaksanaan proyek berjalan inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam perannya sebagai *aid provider*, UNDP mengelola dana hibah internasional secara transparan dan strategis, dengan pendekatan non-karitatif. Dana tidak disalurkan dalam bentuk tunai kepada individu, tetapi diarahkan untuk membangun kembali infrastruktur ekonomi yang menunjang keberlanjutan penghidupan masyarakat terdampak. Terakhir, sebagai *capacity building*, UNDP mengintegrasikan skema padat karya, pelatihan teknis, pemberdayaan kelompok perempuan dan penyintas bencana, serta inisiatif pengelolaan sampah untuk memperkuat kapasitas komunitas secara menyeluruh.

Namun, dalam proses pelaksanaan proyek jterdapat sejumlah tantangan. Pandemi COVID-19 menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan langsung di lapangan. Di samping itu, masih terdapat hambatan struktural terkait akses perempuan terhadap

sumber daya ekonomi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, khususnya di daerah dengan norma gender konservatif. Meski demikian, strategi adaptif yang diterapkan oleh UNDP dan mitra lokal, seperti penggunaan platform daring dan penyesuaian program, mampu mempertahankan efektivitas pelaksanaan proyek.

Secara keseluruhan, Proyek PETRA menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana yang berorientasi pada *livelihood recovery* dilaksanakan dengan pendekatan responsif gender, partisipatif, dan berbasis komunitas. Proyek ini telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), antara lain seperti SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 13 (Aksi Iklim). Dengan demikian, kehadiran UNDP dalam proyek PETRA tidak hanya menjadi pelengkap dari peran pemerintah pusat, tetapi juga aktor kunci dalam membentuk pemulihan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memberikan dua bentuk saran guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dalam pemulihan penghidupan pascabencana oleh UNDP maupun pihak terkait lainnya. Saran tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu saran praktis dan saran akademis.

6.2.1 Saran Praktis

Bagi UNDP, pemerintah daerah, dan lembaga kemanusiaan lainnya, disarankan agar dalam perancangan program pemulihan ekonomi pascabencana ke depan, lebih mengedepankan pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan lokal yang berkelanjutan. Selain itu, penting dilakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi proyek, termasuk melibatkan masyarakat penerima manfaat sebagai subjek utama dalam proses perencanaan hingga monitoring, agar efektivitas program dapat terukur dan dapat terus disempurnakan.

6.2.2 Saran Akademis

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar tidak hanya menggunakan teori organisasi internasional lainnya, tetapi juga mulai mengeksplorasi dan menguji relevansi pendekatan seperti *Common Global Market* yang belum sempat dikaji dalam penelitian ini. Peneliti mendatang juga disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh atau efektivitas keterlibatan UNDP dan proyek-proyeknya melalui metode kualitatif yang lebih mendalam seperti observasi langsung dan wawancara dengan masyarakat terdampak, agar diperoleh data primer mengenai dampak jangka panjang dari program yang dilaksanakan.